



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																	
Landreform	7420102204	Mata Kuliah Pilihan Program Studi	T=2	P=0	ECTS=3.18	7	2 Oktober 2024																																																	
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi																																																		
	Dita Perwitasari, S.H.,M.Kn.		Tamsil,S.H.,M.H.			Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																		
Model Pembelajaran	Case Study																																																							
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																							
	CPL-5	Mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan mengelaborasi hukum positif dan prinsip hukum di bidang hukum keolahragaan dan hukum pada umumnya;																																																						
	CPL-12	Mampu memahami aspek-aspek hukum materil																																																						
	CPL-15	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dengan mengkaji implementasi pengembangan ilmu hukum dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat																																																						
	CPL-20	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dengan taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;																																																						
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																							
	CPMK - 1	Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tujuan dan program landreform Indonesia, larangan absentee, pengaturan kembali tanah pertanian, perjanjian bagi hasil tanah pertanian, aparaturnya penyelenggaraan landreform serta landreform sebagai bagian pembangunan ekonomi.																																																						
	Matrik CPL - CPMK																																																							
		<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <th>CPMK</th> <th>CPL-5</th> <th>CPL-12</th> <th>CPL-15</th> <th>CPL-20</th> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						CPMK	CPL-5	CPL-12	CPL-15	CPL-20	CPMK-1																																											
	CPMK	CPL-5	CPL-12	CPL-15	CPL-20																																																			
CPMK-1																																																								
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																								
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																
CPMK	Minggu Ke																																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																								
CPMK-1																																																								
Deskripsi Singkat MK	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tujuan dan program landreform Indonesia, larangan absentee, pengaturan kembali tanah pertanian, perjanjian bagi hasil tanah pertanian, aparaturnya penyelenggaraan landreform serta landreform sebagai bagian pembangunan ekonomi.																																																							
Pustaka	Utama :																																																							
	1. Parlindungan AP . 1987. Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan . Bandung : Alumni. 2. Boedi Harsono . 2003. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria , Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta : Djambatan. 3. Boedi Harsono. 1994. Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. Jakarta : Djambatan.																																																							
	Pendukung :																																																							
	1. Penelitian : Redistribusi Tanah Terlarang Eks Perkebunan Karangnoko Desa Modangan Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar (2022)																																																							
Dosen Pengampu	Tamsil, S.H., M.H. Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. Dita Perwitasari, S.H., M.Kn.																																																							
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar	Penilaian	Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]			Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian																																																	

	(Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)	[Pustaka]	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memahami tujuan mempelajari dasar-dasar landreform dan literature minimal yang dibutuhkan.	Memahami dan mengerti mempelajari dasar-dasar landreform dan literature minimal yang dibutuhkan.	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p>Materi: dasar-dasar landreform Pustaka: <i>Parlindungan AP . 1987. Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan . Bandung : Alurni.</i></p>	3%
2	Memahami dan mengerti pengertian, tujuan dan program landreform. Memahami pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.	Memahami dan mengerti pengertian, tujuan dan program landreform. Memahami pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p>Materi: pengertian dan tujuan landreform Pustaka: <i>Parlindungan AP . 1987. Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan . Bandung : Alurni.</i></p>	8%
3	Memahami pengertian, tujuan dan program landreform. Memahami pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.	Memahami dan mengerti dan mengerti pengertian, tujuan dan program landreform. Memahami pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p>Materi: pengertian, tujuan dan program landreform. Memahami pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Pustaka: <i>Parlindungan AP . 1987. Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan . Bandung : Alurni.</i></p>	8%

4	Memahami pengertian, tujuan dan program landreform. Memahami pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.	Memahami dan mengerti dan mengerti pengertian, tujuan dan program landreform. Memahami pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p>Materi: pengertian, tujuan dan program landreform. Memahami pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.</p> <p>Pustaka: <i>Parlindungan AP . 1987. Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan . Bandung : Alumni.</i></p>	7%
5	Memahami pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Memahami redistribusi tanah dan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee.	Memahami dan mengerti pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Memahami redistribusi tanah dan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee.	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. kurang; jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p>Materi: pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Memahami redistribusi tanah dan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee.</p> <p>Pustaka: <i>Parlindungan AP . 1987. Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan . Bandung : Alumni.</i></p>	7%
6	Memahami pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Memahami redistribusi tanah dan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee.	Memahami dan mengerti pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Memahami redistribusi tanah dan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee.	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p>Materi: pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Memahami redistribusi tanah dan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee.</p> <p>Pustaka: <i>Parlindungan AP . 1987. Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan . Bandung : Alumni.</i></p>	5%
7	Memahami pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Memahami redistribusi tanah dan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee.	Memahami dan mengerti pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Memahami redistribusi tanah dan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee.	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Praktikum</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p>Materi: pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Memahami redistribusi tanah dan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee.</p> <p>Pustaka: <i>Parlindungan AP . 1987. Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan . Bandung : Alumni.</i></p>	5%

8	UTS	UTS	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	UTS 2 X 50		<p>Materi: UTS Pustaka:</p>	20%
9	Memahami pengaturan kembali gadai tanah- pertanian dan tanaman keras serta perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Memahami penetapan luas minimum pemilikan tanah dan larangan pemecahan pemilikan tanah pertanian.	Memahami dan mengerti pengaturan kembali gadai tanah- pertanian dan tanaman keras serta perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Memahami penetapan luas minimum pemilikan tanah dan larangan pemecahan pemilikan tanah pertanian.	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p>Materi: pengaturan kembali gadai tanah- pertanian dan tanaman keras serta perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Memahami penetapan luas minimum pemilikan tanah dan larangan pemecahan pemilikan tanah pertanian. Pustaka: <i>Parlindungan AP . 1987. Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan . Bandung : Alumni.</i></p>	3%
10	Memahami pengaturan kembali gadai tanah- pertanian dan tanaman keras serta perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Memahami penetapan luas minimum pemilikan tanah dan larangan pemecahan pemilikan tanah pertanian.	Memahami dan mengerti pengaturan kembali gadai tanah- pertanian dan tanaman keras serta perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Memahami penetapan luas minimum pemilikan tanah dan larangan pemecahan pemilikan tanah pertanian.	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p>Materi: pengaturan kembali gadai tanah- pertanian dan tanaman keras serta perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Memahami penetapan luas minimum pemilikan tanah dan larangan pemecahan pemilikan tanah pertanian. Pustaka: <i>Parlindungan AP . 1987. Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan . Bandung : Alumni.</i></p>	5%

11	<p>Memahami pengaturan kembali gadai tanah-pertanian dan tanaman keras serta perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Memahami penetapan luas minimum pemilikan tanah dan larangan pemecahan pemilikan tanah pertanian.</p>	<p>Memahami dan mengerti pengaturan kembali gadai tanah- pertanian dan tanaman keras serta perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Memahami penetapan luas minimum pemilikan tanah dan larangan pemecahan pemilikan tanah pertanian.</p>	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	<p>Pembelajaran langsung 2 X 50</p>		<p>Materi: pengaturan kembali gadai tanah- pertanian dan tanaman keras serta perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Memahami penetapan luas minimum pemilikan tanah dan larangan pemecahan pemilikan tanah pertanian.</p> <p>Pustaka: <i>Parlindungan AP . 1987. Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan . Bandung : Alumni.</i></p> <hr/> <p>Materi: pengaturan kembali gadai tanah- pertanian dan tanaman keras serta perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Memahami penetapan luas minimum pemilikan tanah dan larangan pemecahan pemilikan tanah pertanian.</p> <p>Pustaka: <i>Boedi Harsono. 1994. Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. Jakarta : Djambatan.</i></p>	3%
----	---	---	---	---	--	--	----

12	Memahami tentang aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform.	Memahami dan mengerti aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform.	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform. Pustaka: <i>Parindungan AP . 1987.</i> <i>Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan . Bandung : Alumni.</i> Materi: aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform Pustaka: <i>Boedi Harsono. 1994. Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. Jakarta : Djambatan.</i>	5%
13	Memahami tentang aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform.	Memahami dan mengerti aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform.	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform. Pustaka: <i>Parindungan AP . 1987.</i> <i>Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan . Bandung : Alumni.</i> Materi: aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform. Pustaka: <i>Boedi Harsono . 2003. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria , Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta : Djambatan.</i>	5%

14	Memahami tentang aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform.	Memahami dan mengerti aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform.	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: Memahami tentang aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform. Pustaka: <i>Boedi Harsono . 2003. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria , Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta : Djambatan.</i>	5%
15	Memahami tentang aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform.	Memahami dan mengerti aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform.	Kriteria: 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi: aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform. Pustaka: <i>Parlindungan AP . 1987. Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan . Bandung : Alumni.</i> Materi: aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform. Pustaka: <i>Boedi Harsono . 2003. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria , Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta : Djambatan.</i>	1%

16	Memahami tentang aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform.	Memahami dan mengerti aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform.	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Sedang; jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ujian Akhir semester (luring) 2 X 50	Ujian Akhir semester (luring) 100	<p>Materi: aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform.</p> <p>Pustaka: <i>Parlindungan AP . 1987. Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan . Bandung : Alumni.</i></p> <p>Materi: aparaturnya penyelenggaraan landreform. Memahami perkembangan landreform.</p> <p>Pustaka: <i>Boedi Harsono . 2003. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria , Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta : Djambatan.</i></p> <p>Materi: Ujian Akhir semester (luring)</p> <p>Pustaka: <i>Parlindungan AP . 1987. Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan . Bandung : Alumni.</i></p>	10%
----	--	---	---	---	--------------------------------------	---	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	73.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	4%
3.	Penilaian Portofolio	2.5%
4.	Penilaian Praktikum	5%
5.	Praktik / Unjuk Kerja	5%
6.	Tes	10%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.